

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Kelembagaan Negara: Dinamika Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Assiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*. 1 ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang, Jawa Timur: Intrans Publishing, 2016.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Munaf, Yusri. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015.
- Rakhmat, Muhammad. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoZ Publishing, 2014.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, t.t.

Umar, Nasaruddin, dan Nadhifah Attamimi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Pengawasan Notaris Di Indonesia*. LP2M IAIN Ambon, 2020.

Skripsi, Jurnal, Artikel

Abdulkarim, Deasy Franty. “KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI” 10 (2023).

Akbar. “Fungsi Dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonsia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).” Skripsi, Program Studi hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021.

Ariani, Salma Aulia Farahdina, dan Nanik Prasetyoningsih. “Fighting Corruption Post Revision of the Act of the Corruption Eradication Commission.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (7 Juli 2022): 235–54.

Asyikin, Nehru, dan Adam Setiawan. “KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA DITERBITKANNYA REVISI UNDANG-UNDANG KPK.” *Justitia Jurnal Hukum* 4 (2020).

Einstein, Tigor, dan Ahmad Ramzy. “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 3, no. 2 (4 Oktober 2020).

Fadhil, Moh. “Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi” 15, no. 2 (2019).

Haryadi, Joni. “Analisis Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Fiqih Syiasah.” *Bengkulu: Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2022.*

Janice, Astrella. “STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BPMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU.” *eJournal Pemerintahan* 3 (3) (2015).

- Manullang, Sardjana Orba, Yessy Kusumadewi, Henry Kristian Siburian, dan Baren Sipayung. "Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK" 05, no. 02 (2023).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (12 November 2021): 321.
- Nada, Izzah Qotrun. "KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TELAAH YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MK): The Position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Indonesian Constitutional System (Normative Juridical Review of the Constitutional Court's Decision)." *Constitution Journal* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 61–78.
- Putri, Prila Desita, dan Septi Nurwijayanti. "KEDUDUKAN KPK DALAM TATA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019." *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (29 Agustus 2020): 187–197.
- Putriyana, Ayu, dan Nur Rochaeti. "The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (28 September 2021). 299-310.
- Rizaldi, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?" *Universitas Padjadjaran, Bandung* 12 (2021).
- Simatupang, Fahmi Ilyas. "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia." Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Sodikin. "The Existence of the Corruption Eradication Commission in the Dynamics of Indonesian Constitutional." *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, no. 02 (12 Februari 2023).
- Syahuri, Taufiqurrohman, Gazalba Saleh, dan Mayang Abrilianti. "The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (31 Desember 2022): 2035913.
- Wahab, Mirnawanti, dan Rizki Ramadani. "Environmental Corruption Prevention Policies Through Independent Agencies." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (30 Juni 2021): 327–46.

Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (8 Juli 2020): 239–258.

Yulianto. “Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (27 April 2020): 111–124.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Referensi Lainnya

Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih. Kiara Condong Bandung: Syamil Quran, 2007.

Modul Materi Kelembagaan KPK Untuk Umum, Juli 2019.